



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Pemeriksa Saksi Ahli Kemendagri**

**Lengkapi Berkas  
Perkara DD Wayhawang**

**KOTA BINTUHAN** - Pengusutan kasus dana desa (DD) Wayhawang tahun anggaran 2017 terus berlanjut. Untuk melengkapi berkas perkara, penyidik kemarin (20/1) memeriksa saksi ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Untuk mengetahui proses pekerjaan yang menggunakan DD. Apakah boleh atau tidak dipihak ketigakan seperti yang dilakukan oleh Desa Wayhawang.

Selain itu juga, meminta keterangan lainnya terkait dengan mekanisme DD. Diketahui, berdasarkan audit Inspektorat Kaur DD Wayhawang tahun 2017 tersebut merugikan negara sebesar Rp 280 juta.

Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si saat dikonfirmasi pemeriksaan saksi ahli dari Kemendagri RI ini sebagai pihak yang mengetahui dan membuat aturan pelaksanaan DD setiap tahunnya. Dia memastikan awal Februari ini, semua berkas pemeriksaan sudah rampung. Termasuk penetapan

tersangka.

"Setelah pemeriksaan ahli dari Kemendagri rampung baru akan kita lanjutkan saksi lainnya. Setelah itu kita ekspos dan penetapan tersangka. Kita upayakan berkas ini rampung bulan ini. Karena jumlah kerugian negara dalam kasus ini sudah jelas berdasarkan hasil audit Inspektorat dan tidak dikembalikan oleh mantan kades," terang Ahmad Kairuman.

Untuk diketahui pengusutan kasus ini telah dilakukan sejak tahun 2018 dan setelah keluar hasil audit penyidik memberikan waktu 60 hari untuk mantan kades mengembalikan

temuan tersebut. Namun hingga berakhir tahun 2019, pengembalian kerugian negara sebesar Rp 280 juta lebih tidak dilaksanakan. Sehingga kasus ini naik ke tingkat penyidikan awal bulan Januari 2020.

Sampai saat ini sudah lebih dari 10 saksi dimintai keterangan. Mulai dari sekdes, bendahara desa pemborong pekerjaan jalan, penyedia material dan pihak terkait lainnya. "Untuk Pjs kades dan juga pihak Inspektorat akan kita mintai keterangan setelah usai pemeriksaan saksi ahli nantinya," pungkas Kasat Reskrim Polres Kaur. (cik)



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Pemeriksa Saksi Ahli Kemendagri**

**Lengkapi Berkas  
Perkara DD Wayhawang**

**KOTA BINTUHAN** - Pengusutan kasus dana desa (DD) Wayhawang tahun anggaran 2017 terus berlanjut. Untuk melengkapi berkas perkara, penyidik kemarin (20/1) memeriksa saksi ahli dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Untuk mengetahui proses pekerjaan yang menggunakan DD. Apakah boleh atau tidak dipihak ketigakan seperti yang dilakukan oleh Desa Wayhawang.

Selain itu juga, meminta keterangan lainnya terkait dengan mekanisme DD. Diketahui, berdasarkan audit Inspektorat Kaur DD Wayhawang tahun 2017 tersebut merugikan negara sebesar Rp 280 juta.

Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.Si saat dikonfirmasi pemeriksaan saksi ahli dari Kemendagri RI ini sebagai pihak yang mengetahui dan membuat aturan pelaksanaan DD setiap tahunnya. Dia memastikan awal Februari ini, semua berkas pemeriksaan sudah rampung. Termasuk penetapan

tersangka.

"Setelah pemeriksaan ahli dari Kemendagri rampung baru akan kita lanjutkan saksi lainnya. Setelah itu kita ekspos dan penetapan tersangka. Kita upayakan berkas ini rampung bulan ini. Karena jumlah kerugian negara dalam kasus ini sudah jelas berdasarkan hasil audit Inspektorat dan tidak dikembalikan oleh mantan kades," terang Ahmad Kairuman.

Untuk diketahui pengusutan kasus ini telah dilakukan sejak tahun 2018 dan setelah keluar hasil audit penyidik memberikan waktu 60 hari untuk mantan kades mengembalikan

temuan tersebut. Namun hingga berakhir tahun 2019, pengembalian kerugian negara sebesar Rp 280 juta lebih tidak dilaksanakan. Sehingga kasus ini naik ke tingkat penyidikan awal bulan Januari 2020.

Sampai saat ini sudah lebih dari 10 saksi dimintai keterangan. Mulai dari sekdes, bendahara desa pemborong pekerjaan jalan, penyedia material dan pihak terkait lainnya. "Untuk Pjs kades dan juga pihak Inspektorat akan kita mintai keterangan setelah usai pemeriksaan saksi ahli nantinya," pungkas Kasat Reskrim Polres Kaur. (cik)